

RINGKASAN

M Dani Hafiduddin, NIM. E2A015020, Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Sarang Burung Walet Kebumen, Komisi Pembimbing, Ketua: Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc., Anggota: Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Sarang Burung Walet Kebumen serta usaha dan kendala dalam pendaftaran Indikasi Geografis. Teori yang digunakan untuk menganalisis tesis ini adalah Teori Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif; Teori HKI Robert M Sherwood yang terdiri dari lima teori yaitu *Reward Theory*, *Recovery Theory*, *Incentive Theory*, *Risk Theory* dan *Economic Growth Stimulus Theory*; dan Teori bekerjanya hukum Lawrence M.Friedman yaitu Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif-sosiologis, penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosial.

Hasil penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap indikasi geografis sarang burung walet kebumen, yaitu: 1) Perlindungan hukum IG diperoleh jika potensi IG telah terdaftar, setelah terdaftar pemilik IG (MPIG) akan memperoleh sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak atas IG (Pasal 25 UUMIG) hal ini merupakan bentuk Perlindungan Hukum Preventif. 2) Perlindungan Hukum Represif yang dimiliki MPIG jika potensi IG telah terdaftar diantaranya secara perdata yaitu berupa hak mengajukan gugatan ke pengadilan (Pasal 69 UUMIG), dan hak mengajukan penetapan sementara kepada hakim pengadilan niaga (Pasal 94 UUMIG) serta secara pidana pelaku pelanggaran hak IG diberi sanksi penjara dan/atau denda (Pasal 101 UUMIG). Indikasi Geografis Sarang Walet Kebumen belum mendapatkan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif karena belum didaftarkannya IG Sarang Walet Kebumen kepada Ditjen HKI makanya IG tersebut belum mempunyai hak-hak sebagaimana yang disebutkan diatas. Hal ini karena lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan minimnya sosialisasi dari Ditjen HKI kedaerah-daerah sehingga masyarakat tidak memiliki pemahaman tentang IG serta tidak adanya format yang jelas dari pemerintah Kabupaten Kebumen dalam bentuk peraturan daerah sebagai upaya untuk melindungi potensi IG daerahnya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Sarang Burung Walet Kebumen, UUMIG Nomor 20 Tahun 2016

SUMMARY

M Dani Hafiduddin, NIM. E2A015020, Legal Studies Program Post Graduate Program General Soedirman Purwokerto. Juridical Review Against Geographical Indications Saang Walung Walet Kebumen, Supervising Commission, Chairman: Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc., Member: Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum.

The purpose of this study is to find out how the legal protection against the Swallow's Nest of Kebumen and the efforts and constraints in the registration of Geographical Indications. The theories used to analyze this thesis are Theory of Preventive and Repressive Law Protection; Robert M Sherwood's IPI Theory consists of five theories: Reward Theory, Recovery Theory, Incentive Theory, Risk Theory and Economic Growth Stimulus Theory; and Theory of Law Lawrence M. Friedman's Law of Law Substance, Legal Structure and Legal Culture. Approach method in this research is juridical normatif-sosiologis, this research use approach of science of law and ilrnu social.

The results of research on juridical review of geographical indications of swallow birds' nests are: 1) IG legal protection is obtained if IG potential is registered, once registered IG owners (MPIG) will obtain certificate as proof of ownership of IG (Article 25 UUMIG) is a form of Preventive Legal Protection. 2) Representative Representative Protection which MPIG possesses if the potential of IG has been registered among them in the form of civil rights in the form of the right to file a lawsuit (Article 69 UUMIG), and the right to apply for a temporary appointment to a commercial court judge (Article 94 UUMIG) and criminally perpetrators of IG rights violation sanctioned and / or fines (Article 101 UUMIG). Geographical Indications Swallow Nest Kebumen has not received legal protection either preventively or repressively because it has not been registered IG Swallow Kebumen to the Directorate General of HKI so IG has not had the rights as mentioned above. This is due to the weak awareness of community law and the lack of socialization from the Directorate General of IPR in the regions so that the community does not have an understanding of IG and the absence of a clear format from the Kebumen regency government in the form of regional regulations in an effort to protect the potential of regional GI.

Keywords: Legal Protection, Swallow Nest Kebumen, UUMIG Number 20 of 2016